



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 21 Agustus 2017

Halaman: 14

Lima Raperda Batal Dibahas

JOGJA, BERNAS – DPRD Kota Jogja batal membahas lima Raperda yang sebenarnya telah masuk dalam program pembentukan Perda 2017. Kelima Raperda tersebut adalah Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, raperda izin usaha jasa konstruksi, Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta raperda pengelolaan barang milik daerah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan kelima Raperda yang tidak jadi dibahas tahun ini merupakan inisiatif dari eksekutif. "Ditangguhkan karena secara teknis tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan," katanya, Minggu (20/8).

Ia menjelaskan untuk Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal eksekutif menganggap secara teknis belum efektif. Sebab hal itu terkait dinas baru dan secara sumber daya manusia belum siap, sehingga tidak harus dikejar pada periode ini.

Sedangkan raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran masih terganjal fasilitasi raperda pengelolaan kebakaran di Pemda DIY yang belum turun. Kedua raperda itu saling terkait. "Fasilitasi raperda pengelolaan kebakaran belum turun pembahasan retribusi pemeliharaan alat kebakaran belum bisa dibahas. Belum tahu apakah ada revisi atau tidak hasil fasilitasinya," kata Bambang.

Sedangkan untuk Raperda inisiatif dewan diputuskan tidak ada yang ditangguhkan. Namun dia mengaku sebenarnya ada usulan raperda inisiatif dewan yang ditangguhkan karena tidak memungkinkan secara waktu. Lantaran ada Raperda yang tahapannya masih naskah akademik. Menurutnya dengan waktu yang ada saat ini dikhawatirkan raperda itu hanya masuk pembahasan, tapi tidak akan selesai. Tapi akhirnya pimpinan dewan, lanjutnya, memutuskan semua raperda inisiatif dewan tidak ada yang ditangguhkan. Termasuk raperda ekonomi kreatif yang ditolak Pemda DIY tetap akan dilanjutkan untuk diselesaikan.

"Akan kita evaluasi karena itu tergantung proses pembahasan naskah akademik Raperda. Kalau naskah akademik cepat, pembahasan raperda bisa lebih cepat," katanya.

Ia mengungkapkan Propemperda 2017 mendaftarkan 30 Raperda namun 7 lima diantaranya ditangguhkan. Namun begitu ada dua Raperda baru tambahan dari eksekutif. Mempertimbangan perubahan raperda dalam Propemperda 2017 itu berdasarkan hasil rapat kerja evaluasi bersama Bagian Hukum Pemkot Jogja. Mengingat tengat waktu yang tersisa sampai akhir tahun. Namun dia tidak bisa memastikan naskah akademik lima raperda yang ditangguhkan itu telah siap atau belum.

"Jelasnya kelima raperda yang didrop belum masuk pembahasan," ujarnya.

Sementara dua Raperda tambahan untuk Propemperda 2017 yakni raperda pencabutan perda nomor 2 tahun 2015 tentang izin gangguan (HO) dan raperda perubahan perda retribusi perizinan tertentu. Dia menyampaikan dua raperda tambahan itu dinyatakan eksekutif telah siap. Kedua raperda itu tidak mewajibkan menggunakan naskah akademik karena sifatnya hanya perubahan dan pencabutan perda. (age)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005